

PENDIDIKAN ISLAM INKLUSIF DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI KUPANG

M. Zainul Hasani Syarif¹, Gunawan Ikhtiono², Muhyani³, Chofifah Intan

Hornariswari⁴

Universitas Ibnu Khaldun Bogor¹²³⁴

zainul@uika-bogor.ac.id

ABSTRACT

This study examines the development and progress of inclusive Islamic education, as reflected in the movement carried out by the Muhammadiyah University of Kupang (UMK) which shows an open attitude in pluralistic social life. UMK remains the most popular Islamic university for both Muslims and non-Muslims, making it one of the leading universities. The educational policies implemented aim to attract public attention through physical facilities, academic quality assurance, student intelligence, introduction of the concept of comprehensive education, and building relationships. The community sends their children to study at Islamic educational institutions regardless of religious identity, even though the majority religion in Kupang is Christian. The approach that teaches universal knowledge without prioritizing a particular religious identity encourages the community to study the teachings of other religions.

Keywords: Education, inclusive, multicultural.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam inklusif, yang tercermin dari gerakan yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) yang menunjukkan sikap terbuka dalam kehidupan sosial yang plural. UMK tetap bertahan sebagai perguruan tinggi Islam yang paling diminati oleh umat Muslim maupun non-Muslim, menjadikannya salah satu perguruan tinggi terkemuka. Kebijakan pendidikan yang diterapkan bertujuan menarik perhatian masyarakat melalui fasilitas fisik, penjaminan mutu akademik, kecerdasan peserta didik, pengenalan konsep pendidikan menyeluruh, serta pembangunan hubungan. Masyarakat mengirimkan anak mereka untuk belajar di lembaga pendidikan Islam tanpa memandang identitas agama, meskipun agama mayoritas di Kupang adalah Kristen. Pendekatan yang mengajarkan pengetahuan universal tanpa mengedepankan identitas agama tertentu mendorong masyarakat untuk mempelajari ajaran agama lain.

Kata kunci: Pendidikan, inklusif, multikultural.

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga pendidikan yang berkembang pesat di Kupang dan dianggap sebagai yang paling berpengaruh di Nusa Tenggara Timur adalah Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK), yang didirikan pada tahun 1987. UMK telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan sumber daya manusia, dengan lebih dari 12.475 lulusan yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Sebagai perguruan tinggi swasta, UMK berhasil mempertahankan akreditasi B untuk beberapa program studinya, yang menunjukkan kualitas yang sangat baik. Prestasi ini sangat luar biasa, mengingat UMK berada di tengah masyarakat dengan mayoritas agama non-Islam, namun tetap dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya, yang sebagian besar beragama Kristen dan didukung secara moral serta finansial lebih kuat.



Menariknya, meskipun banyak lembaga pendidikan lain yang juga berkembang pesat seperti Universitas Katolik Widya Mandira, Universitas Kristen Artha Wacana, dan Universitas Nusa Cendana, UMK tetap mampu menarik minat mahasiswa dari berbagai latar belakang agama, termasuk non-Muslim. Lembaga pendidikan Muhammadiyah tampaknya memiliki daya tarik khusus bagi mayoritas penduduk meskipun memiliki ideologi yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari komposisi mahasiswa UMK yang sekitar 70-80% beragama Kristen. Walaupun mayoritas mahasiswa bukan Muslim, interaksi sosial di kampus tetap berlangsung dengan harmonis, dan suasana belajar juga berjalan dengan nyaman tanpa adanya campur tangan pihak eksternal.

Tidak ada paksaan dalam proses pembelajaran, sehingga nilai-nilai perdamaian dan toleransi dapat tercermin dalam interaksi antar mahasiswa. Bahkan beberapa mahasiswa non-Muslim merasa tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam, termasuk bergabung dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), meskipun terdapat persyaratan khusus terkait kajian keislaman. Mereka dengan ikhlas mempelajari Islam sebagai sarana mempererat hubungan persaudaraan dan meningkatkan rasa toleransi antar agama.

Dalam pandangan Anna Triandafilidou dan Shimahara, terjadinya dialektika keilmuan yang menghasilkan sintesis baru bisa terjadi meskipun ada perbedaan. Mereka meyakini bahwa dalam masyarakat ilmiah Kristen, tidak ada pemisahan antara keimanan dan sains, karena ilmu pengetahuan dianggap universal, sistematis, dan logis. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah jika mahasiswa non-Muslim turut menyanyikan lagu Muhammadiyah yang memuji Allah dan Rasul-Nya, atau mempelajari aspek-aspek agama Islam tanpa rasa tertekan. Ini menunjukkan tingkat inklusivitas dan pluralisme dalam pendidikan Muhammadiyah yang sangat diperhatikan, sehingga terkesan adaptif dan toleran.

Jika lembaga pendidikan Muhammadiyah mengajarkan mata kuliah Kemuhammadiyahan untuk memperkenalkan dan melestarikan ideologi Islam, hal yang sama juga dilakukan oleh lembaga pendidikan lain seperti Universitas Kristen Artha Wacana yang mengajarkan mata kuliah Kristen untuk melestarikan ideologi tersebut. Dengan membuka program studi seperti Pendidikan Teologi dan Kepemimpinan Kristen, mereka bertujuan menghasilkan generasi Kristen yang mampu mengemban misi gereja, melayani masyarakat, dan menyebarkan ajaran agama kepada mereka yang membutuhkan.

Keadaan ini menunjukkan bahwa identitas agama atau ideologi suatu lembaga pendidikan tidak menghalangi mereka untuk memberikan pengetahuan kepada siapa saja, terlepas dari latar belakang agama dan budaya. Hal ini tercermin dari keberagaman mahasiswa yang belajar di lembaga pendidikan Islam, yang berasal dari berbagai suku dan agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dengan demikian, lembaga pendidikan ini memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang identitas agama yang ada pada lembaga tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lingkungan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pencarian makna serta mendeskripsikan fenomena secara naratif. Hal ini mencakup pengalaman, perasaan, interpretasi, dan persepsi yang dimiliki oleh objek yang diteliti.



Untuk mempermudah analisis, pendekatan utama yang diterapkan adalah sosiologi pendidikan, yang digunakan untuk memeriksa lebih dalam pengalaman dan hasil individu serta lembaga pendidikan, seperti sekolah atau universitas, dan masyarakat secara berkelanjutan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga berkaitan dengan nilai-nilai moral, logika, dan estetika yang ada dalam diri setiap individu. Oleh karena itu, sosiologi pendidikan dipilih untuk memahami proses sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan menganalisis bagaimana hasil dari proses tersebut berdampak pada masyarakat.

Penelitian ini juga melihat bagaimana sosiologi dan pendidikan saling mempengaruhi satu sama lain. Pendidikan mempengaruhi masyarakat, dan sebaliknya, masyarakat juga memengaruhi pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi sosial sebagai kerangka epistemologis, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang apa yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan untuk berinteraksi dengan subjek penelitian. Pendekatan fenomenologi ini menekankan pada makna yang dibangun melalui peristiwa dan interaksi yang terjadi di antara subjek yang diteliti.

Pendekatan fenomenologi ini relevan karena yang dikaji bukan hanya realitas suatu lembaga dalam skala kecil, tetapi juga faktor-faktor yang mendasari keberadaan lembaga tersebut, meskipun memiliki kekuatan yang lebih kecil, tetap dapat bersaing dengan lembaga lain yang cakupannya lebih luas. Pendekatan sosiologi digunakan untuk mengeksplorasi sejauh mana interaksi dan hubungan antara lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan lain, yang memungkinkan lembaga-lembaga tersebut untuk bersaing dalam membangun ideologi dan mempertahankan eksistensinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Mempertahan Eksistensi Komunitas

Secara umum, setiap kelompok agama, baik yang besar maupun kecil, di suatu wilayah cenderung untuk menjalin kedekatan dengan kelompok tertentu untuk mempererat hubungan satu sama lain. Membina hubungan dengan komunitas lain sangat penting untuk meningkatkan pengakuan terhadap keberadaan kelompok tersebut agar dapat bertahan di tengah keragaman. Hal ini juga berlaku bagi komunitas Muslim di Nusa Tenggara Timur, yang merupakan kelompok minoritas, yang memiliki kewajiban untuk menjaga eksistensi mereka dan diakui oleh komunitas Kristen sebagai mayoritas.

Setiap kelompok memiliki strategi yang berbeda dalam mempertahankan ideologinya. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mendorong kerja sama antar kelompok guna mendukung kelangsungan eksistensi mereka. Mengacu pada pandangan Imre Lakatos dalam filsafat ilmu tentang model ilmiah, ada tiga hal utama yang membantu suatu komunitas bertahan dan berkembang.

Pertama adalah *protective belt*, yang berkaitan dengan membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar untuk menjalin kerja sama dalam pembangunan serta mendapatkan perlindungan. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, masyarakat dipandang sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung dan saling memengaruhi. Masyarakat merupakan ciptaan Tuhan yang kompleks, multidimensi, dan



memiliki keinginan untuk berinteraksi karena berbagai kepentingan seperti politik, agama, ekonomi, dan lainnya. Menurut Koentjaraningrat, hubungan antar individu atau kelompok adalah suatu jaringan yang terbentuk melalui interaksi aktif. Ini menandakan bahwa inti hubungan sosial adalah interaksi yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat, serta merupakan dasar dari aktivitas dan integrasi sosial yang dinamis, yang melibatkan kelompok orang yang berusaha memahami tindakan kehidupan yang sesuai dengan norma yang berlaku.

Bagi Indah Lestari, hubungan yang baik hanya bisa tercipta jika dua syarat dipenuhi, yaitu adanya kontak dan komunikasi. Kedua hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang ideal, ditandai dengan kemampuan berperilaku dan bertindak dengan sopan dan bermartabat. Berdasarkan pengalaman konflik yang terjadi di sekitar kita, hubungan antar kelompok dalam masyarakat multiagama seperti Indonesia memang menjadi keniscayaan. Tujuan hubungan ini lebih kepada memperkuat solidaritas internal untuk mempertahankan eksistensi kelompok, atau bahkan melampaui batas identitas kolektif untuk memajukan kehidupan bersama dalam suatu wilayah. Interaksi sosial ini melibatkan gerakan, ajaran, orientasi teologis, sosial, pendidikan, dan sejarah masing-masing kelompok. Mudzhar menambahkan bahwa dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, penting untuk membangun hubungan yang menciptakan keseimbangan antara mayoritas dan minoritas, sehingga semua kelompok dapat berfungsi secara simbiosis, saling mengontrol dan melindungi diri dari potensi disharmoni yang bisa dikendalikan.

Kedua adalah *progressive research program*, yang berhubungan dengan kebijakan atau program yang jelas dan signifikan bagi kebutuhan masyarakat. Mengutip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, maka kebijakan pendidikan harus memenuhi kebutuhan dasar untuk mengarahkan individu pada pengembangan pribadi mereka, dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Hal ini juga ditegaskan dalam UUD 1945, yang mengatur kewajiban warga negara terkait dengan pertahanan dan keamanan, pemajuan kebudayaan nasional, serta peningkatan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kebijakan pendidikan nasional dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum.

Lin Candides mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan, di antaranya:

1. Globalisasi, yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat global, karena dampaknya yang sangat luas dan dapat dirasakan di berbagai tempat. Globalisasi mendorong terjadinya perubahan dalam struktur geografis, menghubungkan masyarakat yang jauh dan dekat, sehingga peristiwa di satu tempat bisa mempengaruhi tempat lain. Dunia pendidikan, tentu saja, juga tak luput dari pengaruh globalisasi ini.
2. Modernisasi, yang sangat penting untuk menciptakan peradaban yang mampu beradaptasi dengan permasalahan yang ada, dan menghasilkan solusi jangka panjang. Dalam konteks pendidikan, modernisasi harus mengarah pada pembentukan pemikir dan intelektual yang dapat diandalkan sebagai motor penggerak pembangunan masyarakat.
3. Budaya, yang menjadi ciri khas dan identitas antara satu tempat dengan yang lain. Setiap lembaga pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda, karena tantangan dan masalah yang dihadapi juga bervariasi.



4. Politik, yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, karena keduanya saling bergantung. Pemerintah berperan dalam merancang sistem yang berkaitan dengan masalah publik, khususnya pendidikan sebagai kebutuhan dasar. Contohnya, keputusan-keputusan yang diambil oleh Presiden dan DPR tentang anggaran pendidikan menjadi sumber utama untuk mendukung kemajuan pendidikan.

Menurut Armai, keberhasilan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada beberapa faktor yang saling terkait, antara lain: **Sumber daya**, yang penting sebagai pelaksana kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, meskipun informasi dan komunikasi jelas, pelaksanaan kebijakan tidak akan berhasil. **Perilaku**, yaitu komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab para pelaksana yang sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan. **Komunikasi**, yang sangat penting dalam organisasi untuk memastikan bahwa informasi yang diterima akurat dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, yang bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan.

Ali Amron, seperti yang dikutip oleh Rusdiana, mengidentifikasi tiga ciri kebijakan pendidikan yang ideal, yaitu: Adanya tujuan yang jelas dan terarah untuk kemajuan pendidikan; Memiliki aspek hukum yang memenuhi ketentuan konstitusional yang berlaku; Dapat diimplementasikan dengan baik, yaitu dikembangkan oleh pihak yang kompeten dan berwenang agar tidak menimbulkan dampak negatif. Kebijakan pendidikan pada dasarnya menentukan kualitas pendidikan. Jika menggunakan pendekatan fungsi pendidikan atau input-output, maka lembaga pendidikan dianggap sebagai pusat produksi yang menghasilkan output sesuai yang diinginkan.

Ketiga adalah fruitful, berkaitan dengan dampak kebijakan pendidikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk spiritual, kesehatan, ekonomi, dan politik. Pendidikan harus sensitif terhadap model pengembangan sumber daya manusia yang mendukung ketahanan dalam masyarakat. Ketersediaan sumber daya alam dan budaya tidak menjamin kualitas hidup tanpa dukungan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, pendidikan dianggap sebagai kebutuhan paling dasar untuk mengembangkan kemampuan intelektual manusia.

Pendidikan juga berperan dalam memperkenalkan nilai-nilai, standar pengajaran, penguatan identitas bangsa, serta karakter bangsa. Sebagai sarana strategis, pendidikan harus membantu membangun kesadaran kolektif di kalangan warga negara untuk memperkuat ikatan sosial, dengan tetap menghargai keberagaman.

Pendidikan berfungsi sebagai agen perubahan sosial dan penentu arah perubahan yang pasti akan terjadi, baik secara positif maupun negatif. Sebagai agen perubahan, pendidikan harus merencanakan program dan inovasi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial. Konsep sosial harus menjadi prioritas, meliputi teori perubahan sosial, pola kemajuan sosial, dan teori sosiologi.

Meskipun tidak semua rancangan pendidikan dapat terlaksana dengan sempurna, perencanaan tersebut tetap harus dipahami oleh semua pihak terkait. Perencanaan pendidikan tidak hanya berlaku di lingkungan formal, tetapi juga harus diterapkan di lingkungan informal dan nonformal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 ayat 1, pendidikan terdiri dari jalur formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya. Jamrozik menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan melibatkan politik dalam perumusan kebijakan, administrasi dalam penyusunan kegiatan



operasional, dan keduanya harus dijadikan acuan untuk pelayanan langsung di masyarakat. Sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa banyak tempat penyelenggaraan pendidikan, seperti surau di Minangkabau atau pondok pesantren di Jawa, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat untuk masyarakat, dengan tujuan menjawab tantangan dan peluang di lingkungan setempat dengan orientasi masa depan.

Kualitas Penjaminan Mutu Lembaga Pendidikan

Perubahan yang terjadi di masyarakat Kupang saat ini tak lepas dari keberadaan Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK), yang telah membawa dampak positif dan berkelanjutan dalam peningkatan kemampuan akademik serta upaya memperkuat keimanan dan ketakwaan mahasiswanya. Terlihat bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum, untuk memberikan pelayanan spiritual yang terkait dengan ketuhanan, serta memenuhi kebutuhan duniawi. Layanan yang diberikan kepada mahasiswa tidak membedakan adat, ras, suku, maupun agama. Kepala Tata Usaha, Siti Ramla, menyatakan bahwa jumlah mahasiswa setiap tahun terus meningkat, dengan mayoritasnya adalah mahasiswa Kristen. Berdasarkan data sebaran agama mahasiswa selama lima tahun terakhir, dari total 6.964 mahasiswa pada periode 2015-2016 hingga 2019-2020, sebanyak 2.897 mahasiswa beragama Islam, 2.240 beragama Katolik, 1.822 beragama Protestan, dan 5 mahasiswa beragama Hindu.

Data ini menunjukkan bahwa UMK memiliki kualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat, yang tercermin dalam kebijakan yang diterapkan oleh perguruan tinggi. Seperti yang diungkapkan Erwin Wibowo, mutu suatu perguruan tinggi bergantung pada kebijakan yang tepat dan sesuai dengan capaian yang ingin dicapai, serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dinamis, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan kondisi geografis dan antropologis serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan nilai-nilai yang diperhatikan, UMK memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi terkemuka yang menghasilkan lulusan unggul, kompetitif, cerdas secara spiritual, intelektual, dan emosional, serta berwawasan multikultural pada tahun 2025.

Untuk mewujudkan visi tersebut, UMK memiliki beberapa tugas utama, antara lain: mengkaji, membimbing, dan mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan Muhammadiyah; menyelenggarakan pendidikan berkualitas; melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan ilmiah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat; membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak; melaksanakan kegiatan pengembangan kemahasiswaan yang mendukung kemampuan berpikir, ilmu pengetahuan, minat, bakat, serta perhatian terhadap mahasiswa; dan mengembangkan sistem pengelolaan perguruan tinggi yang transparan, bertanggung jawab, demokratis, dan berwawasan multikultural dengan dukungan teknologi informasi serta partisipasi seluruh civitas akademika.

Karena UMK mengusung identitas Islam di daerah yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam, serta mengingat banyaknya lembaga pendidikan yang ada sesuai dengan ideologi mayoritas, UMK menjalankan strategi untuk mempertahankan diri sebagai lembaga pendidikan Islam modern di tengah masyarakat multietnis, suku, budaya, dan agama di Nusa Tenggara Timur (NTT).



Kebijakan Akademik Perguruan Tinggi

Berdasarkan kebijakan akademik yang wajib diterapkan oleh perguruan tinggi untuk menjaga kualitas pendidikan, terdapat tiga poin utama yang harus ada dalam setiap kebijakan akademik, yaitu:

Pertama: Kebijakan Umum. Kebijakan ini berlandaskan pada rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional, yang bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan kompetitif di tingkat nasional dan internasional. Untuk mencapai hal tersebut, sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) harus tersedia dan dikelola dengan baik serta terus ditingkatkan. Inovasi dalam pendidikan perlu didorong melalui peningkatan fasilitas, perangkat lunak, dan perangkat keras yang dibutuhkan mahasiswa. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung transformasi model pendidikan, dari yang berfokus pada pengajaran dosen (teacher-centered) menjadi pembelajaran yang lebih melibatkan mahasiswa (student-centered learning), dengan pendekatan berbasis masalah yang ada di lapangan (problem-based learning).

Terkait dengan instruksi Menteri, dilihat dari kondisi usaha mikro dan kecil saat ini, terbukti bahwa usaha tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini tercermin dalam kebijakan yang diterapkan UMK, yang berhasil menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat yang beragam agama. Dalam hal kualitas, UMK menduduki peringkat kedua perguruan tinggi swasta di Nusa Tenggara Timur menurut penilaian akreditasi dari Copertis Wilayah 7, dengan sebagian besar program studinya mempertahankan akreditasi B. UMK juga mendapat peringkat 156 di antara 20.000 perguruan tinggi dunia berdasarkan Webometric. Fasilitas fisik UMK yang baru dibangun mencakup gedung perkuliahan untuk enam fakultas dan 16 program studi, dengan berbagai fasilitas pendukung seperti perpustakaan dengan 4.500 judul buku, laboratorium biologi, laboratorium komputer, dan laboratorium pembelajaran mikro.

Dalam hal infrastruktur, UMK terletak di lokasi strategis di pusat Kota Kupang, yang dikelilingi oleh gedung-gedung pemerintahan daerah. Jarak dari bandara hanya sekitar 5 km, dan dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi atau umum. Meskipun berada di pusat kota, UMK menyediakan asrama dan tempat tinggal dengan harga terjangkau, serta fasilitas tempat tinggal gratis bagi mahasiswa yang membutuhkan. Untuk mendukung transformasi model pendidikan yang diinginkan pemerintah, sejak awal berdirinya, UMK selalu mengedepankan materi pendidikan yang relevan dengan kondisi lingkungan sekitar. Permasalahan masyarakat, khususnya yang terkait dengan agama, dijadikan sebagai materi pendidikan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial mahasiswa agar mampu menjalin kerjasama profesional dengan menggunakan komunikasi global, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral.

Pendekatan interdisipliner di UMK juga menjadi salah satu cara untuk mendukung mahasiswa dalam memberikan solusi nyata terhadap masalah yang ada di masyarakat, berbasis pada keberagaman, keunikan, dan kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya terlihat dalam kegiatan penelitian atau pengabdian masyarakat, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa, terutama yang tinggal di rumah kos di kawasan pemukiman. Secara alami, hal ini mendukung perkembangan integritas akademik dan pemecahan masalah masyarakat secara berkelanjutan.



Kedua: Penjaminan Mutu Akademik Secara Internal. Selain kebijakan mutu akademik secara umum, penting juga adanya penjaminan mutu akademik yang sistematis untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa dapat merasakan pendidikan yang layak. Hal ini sangat relevan mengingat kondisi negara kita yang tengah menghadapi krisis multidimensi, khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang merasa kesulitan dengan beban hidupnya. Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, provinsi ini masih tercatat memiliki persentase penduduk miskin tertinggi ketiga di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat, dengan angka kemiskinan di Kota Kupang mencapai 8,84%, sedangkan di pedesaan mencapai 24,92%.

Untuk itu, kebijakan UMK adalah memberikan beasiswa terjangkau bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi namun terkendala biaya, serta menyediakan tempat tinggal gratis di apartemen yang ada. Bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tetapi mampu melanjutkan pendidikan, UMK juga menawarkan subsidi biaya pendidikan dengan sistem cicilan dua kali, tanpa batasan minimum. Mahasiswa bebas membayar biaya kuliah kapan saja hingga mendekati kelulusan, dengan kewajiban untuk melunasi biaya tersebut. Ilham menjelaskan bahwa kebijakan ini menjadi daya tarik utama UMK, yang tidak membatasi usia atau jarak waktu antara kelulusan SMA dengan masuk perguruan tinggi, sehingga orang dewasa yang sudah bekerja pun seringkali melanjutkan pendidikan di UMK. Meskipun biaya yang ditawarkan terjangkau, kualitas pendidikan di UMK tidaklah murahan. Pendidikan yang disediakan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja, dan sesuai dengan prinsip tridharma perguruan tinggi. Sebagai contoh, program studi Pendidikan Agama Islam berfokus pada pengajaran ilmu pengetahuan, bukan sekadar doktrin agama, sehingga lulusannya bisa mengajarkan agama dengan pendekatan ilmiah, meskipun berlatar belakang Islam.

Konsistensi ini telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap UMK, yang diakui tidak hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena memiliki integritas yang kuat dalam menjalankan pendidikan berbasis pada nilai-nilai moral, tidak berdasarkan ideologi tertentu. Banyak umat Kristiani yang merasa yakin dan rela menyumbang untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam di daerah mereka. Kepercayaan ini juga muncul karena UMK mendidik lulusannya agar tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki keterampilan hidup yang memadukan aspek spiritual, dan mampu menjalankan tanggung jawab dalam pekerjaan dengan penuh amanah.

Ketiga: Struktur Organisasi Penjamin Mutu Akademik. Untuk menjalankan kebijakan pendidikan, UMK membentuk struktur fungsional yang mencakup berbagai jenjang organisasi mulai dari universitas, sekolah tinggi, jurusan, hingga program studi. Pimpinan perguruan tinggi dibantu oleh tenaga kependidikan yang berperan penting dalam kebijakan akademik sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan. Struktur organisasi ini dimulai dari Rektor hingga unit kemahasiswaan terendah. Rektor UMK saat ini adalah Dr. Zenor Wola, S.Pd., M.Si, dengan Wakil Rektor I, II, dan III masing-masing Abdul Majid, S.PdI, MM, Dr. Paco Tang, S.Sos, M.Si, dan Er. Syamsul Bahri, MM. Data dosen dan pegawai di UMK terdiri dari 127 dosen tetap, 3 dosen DPK, dan 5 dosen LB, serta 44 pegawai tetap dan 10 pegawai kontrak. Pada tahun 2020, jumlah mahasiswa UMK mencapai 6.964 orang.

Data ini menunjukkan bahwa UMK memberikan perhatian besar pada tenaga pendidik, yang berhubungan langsung dengan kualitas perkuliahan dan tingkat kepuasan



mahasiswa. Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen mencapai angka 74,04 pada aspek kepribadian, 73,21 pada aspek sosial, 72,26 pada aspek pendidikan, dan 71,94 pada aspek profesional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan di UMK memberikan dampak positif bagi mahasiswa, dan tingkat kepuasan mereka terhadap layanan akademik terus meningkat. Pada tahun 2015, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap berbagai aspek layanan UMK berada pada angka 55,0 dan meningkat menjadi 85,0 pada lima tahun berikutnya.

Aspek-aspek yang menunjukkan peningkatan tersebut antara lain:

1. Kepemimpinan. Peningkatan upaya pimpinan UMK dalam membuka komunikasi dengan mahasiswa dan meningkatkan empati, tercermin dari respon mahasiswa terhadap pimpinan yang meningkat dari 75,0 pada tahun 2015 menjadi 85,5.
2. Sarana dan Prasarana. Peningkatan kualitas dan ketersediaan fasilitas kampus juga mendapat respon positif dari mahasiswa, dengan kenaikan respon dari 55,0 menjadi 85,0.
3. Dosen. Respon mahasiswa terhadap layanan akademik dosen juga meningkat, dari 75,0 menjadi 80,5, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan.
4. Tenaga Kependidikan. Respon mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari 70,5 menjadi 80,0.

Dari semua kebijakan ini, Rosdiana menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian atau resistensi, mudah dilaksanakan, mendapat dukungan, memberikan manfaat kolektif, dan memiliki kapasitas untuk dijalankan. Hal ini sejalan dengan pendapat Lynn Kennedys, yang menyatakan bahwa suatu kebijakan dikatakan berhasil jika tidak menimbulkan kontroversi dan didukung oleh para pelaksananya.

Sinergitas Lembaga Pendidikan Formal dan Masyarakat

Masyarakat dan lembaga pendidikan pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dan pembinaan pendidikan, baik secara moral maupun material, termasuk dukungan pendidikan dan psikologis. Kedua entitas ini sangat terkait dan saling membutuhkan, di mana sekolah yang menginginkan dukungan dari masyarakat juga harus menyediakan kebijakan yang mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat yang membutuhkan pendidikan tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap kondisi di sekitarnya. Lembaga pendidikan yang ada harus memberikan informasi mengenai tujuan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan harmonis antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting.

UMK menyoroti tiga aspek utama dalam membangun kerjasama dengan masyarakat sekitar Kupang, khususnya yang beragama Kristen, dalam memberikan kesempatan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan.

Pertama: Sistem Pendidikan Inklusif. Pada awal 1990-an, masalah yang sering dihadapi oleh orang tua adalah kebingungan dalam memilih sekolah untuk anak-anak mereka, terutama bagi keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah yang kesulitan mencari lembaga pendidikan yang sesuai dengan minat dan anggaran. Di sekitar UMK, banyak warga yang ragu untuk menyekolahkan anak mereka karena kekhawatiran terkait identitas agama yang terkait dengan UMK, meskipun biaya dan spesialisasi tersedia. Dalam menghadapi masalah ini, perlu adanya lembaga yang turun ke masyarakat untuk



menyosialisasikan konsep pendidikan inklusif, agar masalah agama tidak menjadi penghalang bagi orang tua untuk menyekolahkan anak mereka. Konsep pendidikan inklusif yang diterapkan UMK bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan kepada semua anak, tanpa memandang agama, dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di NTT, yang sebelumnya dikenal memiliki mutu pendidikan rendah. Pendidikan inklusif di UMK mengajak semua pemeluk agama untuk belajar bersama, dengan mengajarkan pendidikan yang berfokus pada kemanusiaan, bukan hanya pada aspek ketuhanan. Pelajaran agama Islam yang diajarkan tidak bersifat dogmatis, melainkan lebih pada pengajaran yang saintifik dan relevan dengan kondisi sosial. Pendidikan di UMK bertujuan untuk membuka ruang bagi budaya yang berkembang di sekitar, tanpa meninggalkan ajaran agama yang diyakini benar.

UMK berkomitmen untuk menghindari pemahaman agama yang rigid dan mengajarkan mahasiswa untuk berani tampil dalam menghadapi tantangan masyarakat. Sebagai contoh, partisipasi mahasiswa UMK dalam menyampaikan pandangan mengenai legalitas minuman keras di NTT menunjukkan bahwa mahasiswa diajarkan untuk menyampaikan argumen berdasarkan berbagai perspektif, termasuk agama, kesehatan, dan implikasi sosial. Dialog yang dikembangkan di UMK lebih berfokus pada pencarian kebenaran bersama, bukan pada kemenangan atau kekalahan dalam diskusi, dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mendorong sikap inklusif di lingkungan pendidikan UMK, dua organisasi kemahasiswaan di kampus, yaitu BEM dan IMM, secara rutin menyelenggarakan dialog antaragama. Organisasi-organisasi ini berusaha menyeimbangkan pengajaran yang bersifat ritual dengan aspek etika sosial masyarakat. Kedua organisasi ini berperan besar dalam mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis mengenai isu sosial terkini, yang kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai akademis yang penting untuk menciptakan kepastian.

Selain kegiatan di kampus, UMK juga mengadakan acara di luar kampus, seperti mengunjungi sekolah-sekolah di sekitar Kupang untuk memperkenalkan kampus dan menunjukkan tingkat inklusivitas serta pluralisme yang ada di UMK. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan melalui penyampaian gagasan, tetapi juga dengan tindakan nyata, seperti menyumbangkan buku pelajaran untuk memperkaya referensi perpustakaan sekolah yang dikunjungi. Bahkan, saat mengunjungi sekolah-sekolah, warga non-Muslim pun tidak keberatan untuk membeli buku agama Islam dan Al-Qur'an yang kemudian disumbangkan. Begitu pula, buku rohani diberikan kepada sekolah-sekolah Kristen, seperti Sekolah Kristen Kupang yang berada dekat dengan UMK. Hal ini mencerminkan upaya untuk menunjukkan rasa saling peduli dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh warga, termasuk menyumbangkan buku-buku suci kepada sekolah-sekolah Islam.

Kedua: Sikap Proporsional. Dalam dunia keagamaan, sering kali terdapat perbandingan yang tidak setara, terutama ketika membahas doktrin teologis dari agama yang berbeda. Misalnya, umat Islam memandang Isa sebagai nabi, sementara umat Kristen melihat Isa sebagai anak Tuhan, yang tentu saja bertentangan dengan pandangan mereka. Begitu pula, umat Kristen memandang Al-Qur'an sebagai buku biasa, sementara bagi umat Islam, Al-Qur'an adalah firman Tuhan. Jika perbedaan ini terus diperdebatkan dalam satu perspektif saja, maka kesepakatan sulit tercapai, malah perbedaan akan semakin kuat dan melebar, menyulitkan upaya untuk menyatukan pemikiran dan perasaan antar kelompok.



Perbedaan kepentingan ini dapat merusak keberagaman, yang sebenarnya merupakan bagian dari rencana Tuhan. Untuk itu, sikap yang diambil adalah sikap proporsional, yang mengutamakan kedewasaan dalam menyikapi warisan leluhur bangsa yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman.

Sikap proporsional ini menjadi penting, terutama bagi lembaga pendidikan Muhammadiyah di Kupang, NTT, yang berada dalam konteks minoritas. Dalam menghadapi kenyataan ini, mereka harus memilih untuk bersikap moderat sebagai solusi perlindungan diri, tanpa menjadi ekstrem dalam perbedaan. Sikap ini memudahkan perkembangan gerakan pendidikan dan sosial di wilayah tersebut. Di NTT, Muhammadiyah mendapatkan kemudahan untuk mengembangkan kegiatan pendidikan dan dakwah, seperti izin untuk mengunjungi rumah-rumah warga dan mendirikan kelompok pengajian. Seiring waktu, mereka membangun gerakan pendidikan yang lebih masif, tidak hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga kesehatan dan pembangunan tempat ibadah, untuk mendukung perjuangan mereka. Berdasarkan analisis dari dosen Katolik UMK, setidaknya ada tiga aspek yang dijalankan UMK dalam kampus dan di luar kampus untuk memenangkan hati masyarakat, yakni kemampuan untuk menempatkan segala sesuatu secara proporsional melalui advokasi pendidikan, advokasi sosial, dan dakwah keagamaan.

1. **Advokasi Pendidikan.** Upaya UMK terkait pendidikan pluralistik dan multikultural tidak hanya mengharuskan pemahaman terhadap keberagaman di sekitar kita, tetapi juga menuntut penerapan etika sosial dalam menyampaikan dakwah pendidikan secara proporsional, agar dapat menjadi energi sosial yang dapat membimbing masyarakat dalam mengatasi dan menetralkan berbagai permasalahan budaya. Advokasi ini merupakan bagian dari hakikat kehidupan manusia untuk saling mengajak dan memberikan semangat, sekaligus membimbing orang lain untuk menerima ajaran dengan kesadaran penuh demi kebaikan bersama. Pendidikan, khususnya dalam tiga bidang akademik, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat, berperan penting dalam membentuk karakter manusia. UMK menyadari bahwa meskipun berada dalam ruang yang bebas, tetap ada batasan dalam penyampaian keyakinan agama, yang sebaiknya dilakukan secara dialogis dan akademis di lingkungan kampus. Lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat untuk membahas masalah sosial yang ada, yang dapat dikaji dalam kelas atau forum formal lainnya. Terkadang, dalam teks-teks keagamaan, kata "kompromi" sulit diterima, karena dianggap bisa melemahkan ajaran agama. Oleh karena itu, kompromi sering kali tidak digunakan dalam dialog kampus, karena dikhawatirkan dapat merusak pondasi agama dan negara. Salah satu isu yang dibahas dalam forum resmi adalah tujuan kedatangan Islam ke Nusantara dan keberanian umat Islam untuk masuk gereja di Nusa Tenggara Timur. Dialog ini memberikan pemahaman logis bagi sesama mahasiswa bahwa Islam datang tanpa ingin menghapuskan agama lain.
2. **Advokasi Sosial.** Dakwah sosial di lembaga pendidikan melibatkan kebijakan sosial, sosial budaya, dan sosial ekonomi. UMK mengadopsi dua pendekatan dalam advokasi sosial, yaitu pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan struktural berfokus pada kekuatan politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui peran mereka di pemerintahan sebagai pembuat kebijakan publik. Tokoh seperti Abdul Rahman Wahid dan Tuan Guru Pajang Zin Al-Majdi menggunakan pendekatan ini untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan latar belakang keagamaan mereka. Di Nusa



Tenggara Timur, pendekatan struktural ini diterapkan dalam pemilihan gubernur NTT tahun 2018, di mana mayoritas umat Islam mendukung Victor Bungtilo Laiskudat, seorang Kristen, meskipun sering muncul kontroversi terkait partainya. Meskipun ada pandangan negatif tentang Victor, kenyataannya setelah ia menjabat sebagai gubernur, kebijakan terkait izin tempat ibadah bagi umat Islam menjadi lebih mudah, dan mushola dibangun di kantor-kantor pemerintahan. Perubahan ini menunjukkan kebijakan yang mendukung umat Islam, meskipun ada kontroversi lainnya, seperti penolakan terhadap perda syariat Islam, yang dianggap tidak relevan dengan mayoritas masyarakat Kristen di daerah tersebut. Kebijakan ini, meskipun kontroversial, membawa dampak positif bagi umat Islam, termasuk lembaga pendidikan Islam seperti UMK. Victor juga memberikan pernyataan yang memicu debat, namun mendorong perkembangan lembaga pendidikan di NTT, dengan membuka peluang untuk mendirikan tempat ibadah dan lembaga pendidikan Islam. Ia meyakini bahwa dengan memperbanyak lembaga pendidikan, masyarakat akan berkembang dan daerahnya akan maju.

3. **Advokasi Keagamaan.** Di Indonesia yang multikultural, kegiatan advokasi mengenai isu keagamaan tidak selalu berjalan mulus, baik dalam ranah kelembagaan maupun personal. Hal ini disebabkan oleh adanya egoisme ideologis dan personal yang seringkali diklaim sebagai kebenaran agama. Isu ini menjadi sangat penting karena perbedaan pemahaman agama bisa mengganggu hubungan antar pemeluk agama dan bahkan menimbulkan keresahan sosial. Hampir setiap agama pernah mengalami hal serupa, seperti ketegangan yang muncul baru-baru ini ketika sekelompok orang mengganggu ibadah umat Kristen di rumah ibadah mereka dengan memutar lagu-lagu dan doa menggunakan sound system. Perbedaan tafsir terhadap teks-teks suci yang dianggap sebagai wahyu Tuhan sering menjadi sumber perselisihan. Beberapa pihak mengklaim bahwa hanya mereka yang berhak menafsirkan teks-teks suci tersebut dan menganggap penafsiran orang lain salah, yang memunculkan istilah "kafir" bagi pihak yang berbeda. UMK menghindari sikap ekstrem ini dengan mendorong dakwah agama yang tidak hanya berfokus pada teks agama, tetapi juga memperhatikan kebaikan, kesopanan, dan relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Dakwah di UMK berusaha menghindari fanatisme agama dan lebih mengutamakan pendekatan persuasif yang menghargai budaya dan adat istiadat lokal, bukan dengan cara pemaksaan yang dapat menimbulkan ketakutan. Dakwah yang dilaksanakan dengan cara ini telah membantu menghidupkan dan menyehatkan kehidupan masyarakat, termasuk non-muslim, di Nusa Tenggara Timur. Dakwah yang dilakukan oleh UMK melalui ceramah, tulisan, dan kegiatan sosial di masyarakat telah berhasil mengenalkan Islam yang sebelumnya kurang diterima di daerah ini, dengan memperlihatkan bahwa Islam adalah agama yang penuh cinta kasih.

Ketiga: Komunikasi Aktif. Ilmu komunikasi memiliki kaitan erat dengan kehidupan manusia, terutama dalam hal produksi, pengolahan, dan dampak dari sistem serta simbol yang ada di berbagai bidang seperti agama, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Wilbur Schramm menggambarkan ilmu komunikasi sebagai titik persimpangan berbagai ilmu lain dalam perjalanan ilmiah mereka, karena komunikasi merupakan kunci dalam membangun dialog antara budaya yang berbeda. Di UMK, pelaksanaan tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dipengaruhi oleh faktor-faktor yang



unik, salah satunya adalah keberagaman suku dan agama yang ada. Sebagai lembaga yang berada dalam komunitas minoritas, UMK menghadapi tantangan tambahan dalam mengimplementasikan tridharma dengan mengembangkan keterampilan yang berkaitan dengan komunikasi sosial, psikologi, sosiologi, antropologi, dan hukum masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Komunikasi yang efektif difasilitasi oleh lembaga pendidikan agar interaksi antara berbagai elemen masyarakat dapat berjalan lancar dan pesan-pesan pendidikan dapat disampaikan secara efisien kepada masyarakat. UMK memperhatikan aspek teknis dan fungsional dalam komunikasi agar proses interaksi ini dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks masyarakat Kupang, nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang tercatat dalam sejarah menjadi pedoman etika dan kebijakan yang harus diikuti dalam berperilaku. Dimensi ketuhanan dan kesatuan saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang majemuk, sehingga keduanya menjadi faktor penting bagi lembaga pendidikan Islam di daerah tersebut untuk menyediakan komunikasi yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun, sehingga tidak memengaruhi tingkat produktivitas keagamaan. Eko menjelaskan bahwa nilai-nilai luhur ini menjadi misi pendidikan yang diterapkan oleh UMK dalam menanamkan nilai-nilai secara efektif dan komunikatif, serta memberikan layanan terbaik melalui hasil penelitian yang didasarkan pada permasalahan masyarakat. Komunikasi pendidikan dalam usaha kecil dan menengah di UMK terjalin dalam hubungan timbal balik fungsional dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi bagi kemajuan sosial masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampus. Selain itu, prinsip dasar pendidikan UMK juga mencakup kepercayaan penuh terhadap masyarakat sekitar dan pentingnya pengembangan masyarakat.

Pengembangan masyarakat melalui usaha mikro dan kecil tercermin dalam tiga hal: 1) Dinamika, yang menciptakan keyakinan dan partisipasi aktif dari masyarakat; 2) Demokratisasi, yang memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk berinisiatif dalam mengembangkan pendidikan; 3) Modernisasi, yang berkaitan dengan kemajuan sosial dan ekonomi. Prinsip utama dalam hal ini adalah pendidikan, diseminasi, atau komunikasi. Dalam pengembangan usaha mikro dan kecil, faktor material serta faktor psikologis harus dipertimbangkan dengan cermat, karena faktor psikologis mempengaruhi tercapainya tujuan pembangunan. Usaha mikro dan kecil juga menyadari permasalahan masyarakat sekitar, sehingga pendidikan yang diberikan menjadi pelengkap pengetahuan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, UMK menyediakan jurusan yang memanfaatkan sumber daya perikanan, seperti akuntansi perikanan dan usaha kelautan, untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di Nusa Tenggara Timur yang kaya akan laut dan ikan. Potensi perikanan yang besar di daerah ini harus dikelola dengan baik, mengingat hasil tangkapan yang masih belum dikelola maksimal. Oleh karena itu, pembelajaran ini dapat meningkatkan peran generasi muda dalam pertumbuhan kekayaan perikanan dan menarik perhatian investor serta konsumen nasional dan internasional.

Contoh lainnya adalah jurusan pendidikan sosiologi yang mengajarkan cara berpenampilan, berorganisasi, mengurus rumah tangga, mendidik anak, serta membentuk sikap positif lainnya. Hal ini penting, mengingat Nusa Tenggara Timur dikenal dengan kepribadiannya yang tangguh. Ada tiga faktor yang memengaruhi karakter masyarakat di sana: faktor genetik, alam, dan lingkungan. Faktor genetik menyatakan bahwa sifat seseorang dapat dipengaruhi oleh keturunan, sementara faktor alam menunjukkan bahwa kondisi geografis yang keras telah membentuk kepribadian yang tangguh. Faktor



lingkungan berperan karena anak-anak di daerah tersebut diberi kebebasan untuk bermain di alam bebas, seperti di pegunungan dan laut, yang membentuk karakter mereka.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam pendidikan Islam di Nusa Tenggara Timur, di mana mayoritas penduduknya beragama Kristen. Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK), yang didirikan pada tahun 1978, telah berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan minoritas, bersaing, dan menemukan titik temu dengan penduduk mayoritas Kristen. Keberhasilan ini tercapai berkat sikap terbuka UMK dalam mendefinisikan pemikiran inklusif, toleran, dan berkeadilan dalam kehidupan sosial yang majemuk. Realitas empiris menunjukkan bahwa UMK tetap menjadi salah satu institusi Islam terpopuler, dengan banyak peminat dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Dengan kebijakan pendidikan yang fokus pada kecerdasan siswa, fasilitas fisik, penjaminan mutu akademik, dan membangun hubungan partisipatif, UMK berhasil masuk dalam kategori universitas terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achied, Zainuddin. *Kiprah Perjuangan Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur: Sebuah Catatan Sejarah Tahun 1935-2010*, (Kupang: UM Kupang Press, 2011).
- Al-Munawir, Said Agil Husain. *Fikh Hubungan antar Agama*, Cet. II, (Jakarta: Ciputat Press, 1993).
- Anton. "Peran Universitas Muhammadiyah Kupang dalam Pengembangan Pendidikan Islam." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 3 No. 1 April 2019).
- David Efendi and Suswanta. "Politics of Education; Multiculturalism Practice in Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT." *Iseedu* Volume 1, No. 1, November 2017.
- Dokumen resmi profil UMK.
- Elly M Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial; Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Robert C. Bogdan and Bilken Sari Knopp, *Qualitive Research for Education an Introduction to Theory and Methods*, Third Edition, (Needham Height: Viacom Company, 1998).
- Saputra, Kiki. *Pendidikan Berbasis Enterpreneurship; Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Secara Mandiri*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015).
- Sucipto, Bambang. "Lembaga Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial." *Insania* Vol. Vol 18, 16 No. 3, September-Desember 2013.
- Suharto, Toto. "Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat." *Cakrawala Pendidikan*, November 2005, Th. XXIV, No. 3, h. 329.
- Triandafyllidou, Anna. *Addressing Cultural, Ethnic & Religious Diversity Challenges in Europe*, (European University Institute, 2011).

